BAB II

PROFIL INSTANSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

II.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam GBHN salah satu misinya adalah perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan diarahkan untuk dapat dinikmati secara laebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat lahir batin.

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentuukan watak dan kepribadian bangsa, perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan hidup dan terwujudnya tertib banguan yang sehat, kuat, indah dan serasi dengan lingkungan. Disamping itu pembangunan sektor usaha serta sektor lainnya juga perlu didukung untuk kesejahteraan dan peningkatan kehidupan masyarakat.

Kebijakan tentang bangunan di Kota Bandung disusun dan diselenggarakan dengan berlandaskan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yaitu "Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota jasa Tahun 2004 yang Genah Marenah Tumaninah".

Dalam rangka menghadapi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Funsi dan peranan Dinas Bangunan sangat penting baik dalam lingkup Pekerjaan Umum Cipta karya dibidang bangunan maupun memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah dari sector retribusi IMB.

Dinas bangunan adalah instansi yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum meliputi antara lain penertiban, pengawasan dan pengendalian bangunan; penerapan perizinan bangunan; serta pengujian kontruksi dan utilitas bangunan.

Dinas Bangunan berlokasi di JL.Wastukencana NO.2 Bandung dan mempunyai 6 (enam) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Bangunan Wilayah Bojonegara, Cibeunying, Karees, Tegallega, Ujungberung dan Gedebage.

II.1.1 LANDASAN HUKUM KEBERADAAN ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Banguna Kota Bandung tertuang dalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung manjadi dasar landasan hukum keberadaan Dinas Bangunan dan dasar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.

II.1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Tugas Pokok

   Dalam PERDA Kota Bandung NO 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum.

2. Fungsi

   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas bangunan mempunyai fungsi :

   a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang bangunan
   b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang bangunan yang meliputi administrasi bangunan, tata bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan.
   c. Melaksanakan pelayanan dan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.

II.2 VISI DAN MISI DINAS BANGUNAN

II.2.1 VISI

Dinas Bangunan Kota Bandung mempunyai Visi :

" Terwujudnya Tertib Bangunan Tahun 2004 "

Dikaitkan dengan Visi Kota Bandung yaitu : Terwujudnya Kota Bandung sebagai kota jasa tahun 2004 yang Genah Marenah Tumaninah, maka antara Visi Dinas Bangunan dan Visi Kota Bandung mempunyai kaitan yang sangat erat.

Tertib Bangunan mengandung arti :

1. Tertib bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota

2. Tertib bangunan sesuai dengan teknis dan kontruksi bangunan
3. Tertib bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Tertib administrasi bangunan

Dengan terwujudnya tertib bangunan, maka diharapkan dapat menunjang terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Jasa Tahun 2004 yang genah marenah tumaninah.

Dengan tertib bangunan, kota Bandung menjadi kota yang genah marenah tumaninah.

II.2.2Misi

Misi Dinas Bangunan adalah :

Meningkatkan Kinerja Dinas Bangunan dan partisipasi warga kota, dengan melalui :

1. Menampung informasi dan aspirasi tentang bangunan dari warga kota
2. Memberikan pelayanan administrasi bangunan berupa perizinan dengan cepat & tepat.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah
4. Menigkatkan penyuluhan / sosialisasi peraturan tentang bangunan.
5. Melaksanakan penataan bangunan baik bangunan pemerintah maupun bangunan masyarakat.
6. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian serta penertiban bangunan
7. melaksanakan pelayanan dan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan dan administrasi kepegawaian Dinas.

II.3 NILAI – NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS SERTA FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

II.3.1 Nilai-nilai strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis yang berpengaruh langsung terhadap perwujudan langsung visi dan misi Dinas bangunan adalah :

- Ketaqwaan
- Persatuan dan kesatuan bangsa
- Kebersamaan dan gotong royong
- Kerjasama
- Kepatuhan

- Kejujuran
- Produktif dan inovatif
- Ketelitian dan tepat waktu
- Tertib
- Ramah tamah
- Daya saing global
- Bertanggungjawab
- Keahlian
- Berwawasan lingkungan
- Estetika

Dengan memiliki nilai-nilai strategis tersebut, maka visi dan misi Dinas Bangunan akan terwujud.

II.3.2 Lingkungan Strategis Organisasi

Setelah visi dan misi organisasi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis strategi dengan menggunakan intrumen analisis SWOT, Analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan internal dan eksternal kita. Dalam lingkungan internal dan ekternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu kita miliki dan kita hadapi. Yakni secara internal kita memiliki sejumlah kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weak nesses*), dan secara eksternal kita akan berhadapan dengan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Kegiatan dalam rangka analisi lingkungan ini lazim disebut sebagai environmental scanning yaitu lingkungan untuk mendapatkan gambaran yang persis (akurat) mengenai diri kita da lingkungan kita.

Dalam bentuk yang sudah disederhanakan, analisis SWOT dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

   Kekuatan dari dalam yang kita miliki Dinas Bangunan antara lain :

   a. Adanya PERDA 05 Tahun 2001 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
   b. Jumlah Pegawai Dinas Bangunan (SDM) memadai yaitu sebanyak 287 orang.
   c. Adanya dukungan dana / anggaran yang jelas setiap tahunnya

d. Adanya kemauan dan loyalitas karyawan yang kuat dalam melaksanakan tugas.

Adapun Kelemahan adalah :

a. Kualitas SDM belum seluruhnya memadai
b. Sarana dan prasarana belum lengkap seluruhnya
c. Koordinasi baik intern maupun ekstren belum dilakukan secara optimal
d. Lemahnya dalam penegakan peraturan / hukum

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang yang dimiliki :

a. Meningkatnya kebutuhan lingkungan
b. Adanya PERDA No.14 Tahun 1998 tentang Bangunan
c. Adanya alih fungsi kota
d. Adanya dukungan organisasi profesi
e. Adanya dukungan Pemerintah Kota
f. Kondusifnya keamanan kota

Ancaman yang timbul :

a. Lemahnya kesadaran sebagian masyarakat
b. Sulitnya dibendung arus urbanisasi
c. Kurang mendukungnya kondisi lingkungan
d. Belum kondusifnya perekonomian

II.3.3 Analisis Strategi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal maka stategi–strategi yang akan dilaksanakan adalah :

- Strategi Kekuatan–Peluang
  1. Mengoptimalkan sumber daya manusia untuk melayan kebutuhan masyarakat dalam bidang perizinan bangunan atau rancang bangun.
  2. Manfaatkan dukungan dana APBD untuk melaksanakan PERDA NO. 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kota Bandung
  3. Memanfaatkan kebijakan di bidang bangunan untuk meningkatkan stertib bangunan yang denah marenah tumaninah

4. Memanfaatkan kemauan karyawan untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan bangunan di lapangan kepada Masyarakat.

UNIKOM

- Strategi kekuatan–Ancaman
  1. Melaksanakan kebijakan di bidang bangunan dangan optimal untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka tertib bangunan.
  2. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk terjun ke lapangan mengantisipasi adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya tertib bangunan.

- Stategi kelemahan – Peluang
  1. Meningkatkan koordinasi baik intern maupun ekstren untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota dan masyarakat dalam menertibkan bangunan.
  2. Meningkatkan Kualitas SDM, sarana dan prasarana dengan dukungan dari Pemerintah Kota
  3. Meningkatkan penegakan hukum dengan dukungan dari Pemerintah Kota

- Stretegi Kelemahan – Ancaman
  1. Meningkatkan kualitas SDM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang bangunan
  2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk membendung arus urbanisasi yang cukup tinggi.
  3. Tingkatkan sosialisasi peraturan bangunan untuk mengatasi lemahnya kesadaran dan pengetahuan sebagian anggota masyarakat

Strategi tersebut diatas dimaksudkan guna terwujudnya tertib bengunan di Kota Bandung sehingga dapat mendukung visi Kota Bandung yiatu " Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Jasa Tahun 2004 yang Genah Mernah Tumaninah".

II.3.4 Faktor –faktor kunci keberhasilan

1. Faktor Sumber Daya :
   a. Meningkatkan Ketakwaan Karyawan baik dalam kehidupan sehari–hari maupun dalam melaksanakan tugas.
   b. Meningkatkan kejujuran, ketelitian, keterbukaan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
   c. Meningkatkan Kesejahteraan karyawan agar karyawan giat melaksanakan tugasnya.
   d. Melaksanakan SDM melalui pendidikan baik pendidikan formal, penjengjangan maupun pelatihan–pelatiahan teknis yang menunjang pelaksanaan tugas.
   e. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, dapat ditempuh suatu strategi atau upaya melalui penyediaan sarana dan prasaaran yang memadai dan pelaksanaan pekerjaan sehari–hari dan pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
   f. Meningkatkan Motivasi pegawai, bagi yang berprestasi diberikan penghargaan (intensif, pujian,kenaikan pangkat dll) sedangkan bagi melakukan pelanggaran diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   g. Mengintensifkan koordinasi baik intern maupun ekstern.

2. Faktor Kunci Keberhasilan guna meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat) :
   a. Menampung aspirasi dari warga kota tentang bangunan
   b. Memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib bangunan, melalui penyuluhan–penyuluhan, kemitraan dengan pihak swasta untuk penataan bangunan dll.
   c. Mendorong masyarakat untuk membuat IMB dan melaksanakan tertib bangunan di daerahnya / tempat tinggalnya
   d. Membudayakan IMB guna terwujudnya tertib bangunan
   e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang rancang bangun yang diperlukan masyarakat
   f. Melaksanakan sosialisasi peraturan bangunan
   g. Mengintensifkan pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan.

II.4 TUJUAN DAN SASARAN DINAS BANGUNAN

II.4.1 Tujuan

Dinas bangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan tertib bangunan yang genah merenah tumaninah, dalam arti bangunan sesuai dengan tata ruang kota, teknis dan kontuksi bangunan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan tertib bangunan, bangunan menjadi sehat, kuat, indah dan serasi dengan lingkungan sehingga dapat menunjang terwujudnya kota Bandung sebagai kota Jasa Tahun 2004 yang genah merenah tumaninah.

II.4.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya tertib bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, teknis dan kontruksi bangunan, yuridis (peraturan yang berlaku) maupun serasi dengan lingkungan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan tertib bangunan.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam membuat IMB.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang retribusi IMB.
5. Tertatanya bangunan–bangunan milik pemerintah dan masyarakat.
6. Terkendalinya bangunan – bangunan tanpa IMB dan bangunan kumuh.
7. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang prima.

II.5 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

II.5.1 Kebijakan Dinas Bangunan

Untuk mendorong upaya terwujudnya tertib bangunan yang genah merenah tumaninah, maka Dinas Banguna Kota Bandung, dalam kurun waktu 2001 – 2004 ini diarahkan upaya–upaya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan IMB dengan cepat dan tepat.
   - ♦ Cepat dalam arti pembuatan IMB kurang dari 12 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan membayar retribusi IMB.
   - ♦ Tepat dalam arti baik dalam persyaratan administratif maupun teknis telah lengkap dan benar serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam tahun anggaran 2000, pendapatan dari sektor IMB telah melampaui target yaitu sebesar Rp. 4.446.540.317 (114.60%) dari target Rp. 3.880.000.000. Untuk tahun 2001 ditetapkan taret sebesar 6.000.000.000 guna menunjang meningkatnya PAD.

3. Melaksanakan survey, perencanaan, pembangunan, penataan bangunan baik bengunan untuk pemerintah maupun bangunan masyarakat (umum).

4. Mengintensifkan pengawasandan penertiban bangunan melalui pendataan, penyuluhan, pemanggilan, pensegelan dan pembongkaran bangunan.

5. Melaksanakan pelayanan dan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.

II.5.2Program Operasional Organisasi

Program yang telah dipersiapkan untuk tahun 2001-2004 adalah :

1. Program ketatausahaan
2. Program Pelayanan Perizinan Bangunan (IMB)
3. Program Pembuat Surat Keputusan Walikota tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar
4. Program Pengadaan Peta Dasar (*Basic Map*)
5. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)
6. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang Tata cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)
7. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang Surat Izin Penggunaan Bangunan (SIPB)
8. Program Pembuatan Surat Izin Layak Huni Bangunan (SILHB)
9. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang instalasi dan Kelengkapan Bangunan di Kota Bandung
10. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang Sertifikat Bangunan (SB)
11. Program Survey dan Anaalisa Bangunan
12. Program Perencanaan Tata Bangunan
13. Program Pengawasan dan Pelaksanaan Bangunan

14. Program Database Bangunan
15. Program Penataan Bangunan Pemerintah
16. Program penyusunan Perencanaan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
17. Program Penataan Bangunan
18. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian ruang kota
19. Program penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur management tata ruang kota
20. Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
21. Program Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Bojonegara
22. Program Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Cibeunying
23. Program Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Karees
24. Program Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Tegallega
25. Program Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Ujungberung
26. Program Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Gedebage

II.5.3 Kegiatan Organisasi

1. Program Pelayanan Perizinan Bangunan (IMB) meliputi kegiatan :
   a. Penerimaan Permohonan
   b. Penelitian Berkas Permohonan
   c. Penelitian ke Lapangan
   d. Pemrosesan data Permohonan
   e. Pembuatan konsep SIMB
   f. Pengesahan SIMB

2. Program pembuatan surat keputusan Walikota tentang harga dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar meliputi kegiatan :
   a. Pembuatan Konsep Surat Keputusan Walikota tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar
   b. Pengesahan Surat Keputusan

c. Sosialisasi Keputusan Walikota tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongnkar
d. Pemberlakuan Keputusan Walikota tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar

3. Program Pengadaan Peta Dasar (*Basic Map*) meliputi kegiatan :
   a. Merencanakan pengadaan peta dasar (*Basic Map*)
   b. Pembuatan Peta Dasar dan Peta Situasi

4. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) meliputu kegiatan :
   a. Merencanakan pembuatan SIBP
   b. Rapat koordinasi
   c. Melaksanakan studi banding
   d. Pengolahan studi banding
   e. Penyempurnaan konsep aturan SIBP
   f. Pengesahan aturan Sosialisasi SIBP
   g. Sosialisasi SIBP
   h. Pemberlakuan SIBP

5. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang tata cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)
   a. Merencanakan pembuatan tata cara permohonan IMB
   b. Rapat koordinasi
   c. Meaksanakan studi banding
   d. Pengolahan studi banding
   e. Penyempurnaan konsep aturan Tata cara Permohonan IMB
   f. Pengesahan aturan tata cara permohonan IMB
   g. Sosialisasi tata cara permohonan IMB
   h. Pemberlakuan tata cara permohonan IMB

6. Program Surat Keputusan Walikota tentang Surat Izin Penggunaan Bangunan (SIPB)
   a. Merencakan pembuatan tata cara permohonan SIPB
   b. Rapat Koordinasi

c. Melaksanakan Studi Banding
d. Pengolahan Studi Banding
e. Penyempurnaan konsep aturan SIPB
f. Pengesahan aturan
g. Sosialisasi SIPB
h. Pemberlakuan SIPB

7. Program Pembuatan Surat Izin layak Huni Bangunan (SILHB)
   a. Merencakan pembuatan SILHB
   b. Rapat Koordinasi
   c. Melaksanakan Studi Banding
   d. Pengolahan Studi Banding
   e. Penyempurnaan konsep aturan SILHB
   f. Pengesahan aturan
   g. Sosialisasi SILHB
   h. Pemberlakuan SIPB

8. Program Surat Keputusan Walikota tentang Instalasi dan Kelengkapan Banguan di Kota Bandung
   a. Pembuatan Konsep Keputusan Walikota tentang Instalasi dan Kelengkapan Banguan di Kota Bandung
   b. Pengesahan Surat Keputusan
   c. Sosialisasi Keputusan Walikota tentang Instalasi dan Kelengkapan Bangunan Kota Bandung
   d. Pemberlakuan Keputusan Walikota tentang Instalasi dan Kelengkapan Bangunan Kota Bandung

9. Program Pembuatan Surat Keputusan Walikota tentang Sertifikat Bangunan (SB) meliputi kegiatan :
   a. Merencanakan pembuatan SB
   b. Rapat Koordinasi
   c. Melaksanakan Studi Banding
   d. Pengolahan Studi Banding
   e. Penyempurnaan konsep aturan SB
   f. Pengesahan aturan

g. Sosialisasi SB

h. Pemberlakuan SB

10. Program Survey dan Analisa Bangunan meliputi kegiatan :

a. Pendataan harga bahan bangunan

b. Menyiapkan harga bahan bangunan

c. Menghitug asset bangunan

d. Melaksanakan penghapusan bangunan

11. Program perencanaan Tata Banguan meliputi kegiatan :

a. Menyiapkan dan meyusun konsep perencanaan bangunan dan prasarana lingkungannya pada lahan milik Pemerintah kota Bandung

b. Melaksanakan pembuatan gambar rencana bangunan dan prasarana lingkungannya

12. Program Pengawasan dan Pelaksanaan bangunan meliputi kegiatan

a. Mengawasi, bimbingan teknis, kontroling dan koordinasi pelaksanaan

b. Memonitoring

c. Melaksanakan

13. Program Database Bangunan meliputi kegiatan :

a. Pembuatan Program Database Bangunan

b. Pengolahan Database Bangunan

c. Analisa database bangunan

d. Evaluasi database Bangunan

14. Program penataan Bangunan Pemerintah meliputi kegiatan Penunjang Perencanaan sarana bangunan pemerintah berupa :

a. Melaksanakan survey dan analisa data

b. Pembuatan RAB, RKS dan gambar bestek

c. Pembuatan laporan pelaksanaan proyek

15. Program penyusunan Perencanaan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung meliputi kegiatan :

a. Penyusunan perencanaan persyaratan teknis bangunan gedung

b. Sosialisasi persyaratan teknis bangunan gedung

16. Program pentaan bangunan meliputi kegiatan :
    a. Renovasi kantor PD kebersihan
    b. Pengkajian studi kelayakan Struktur Bngunan Gedung PEMDA Jl A. Yani
    c. Rehabilitasi gedung Gelangang Taruna Wilayah Karees
    d. Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Punclut

17. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian Ruang kota meliputi kegiatan :
    a. Perencanaan bangunan sarana Pemerintah
    b. Pengawasan bengunan sarana pemerintah
    c. Renovasi Kantor dan sarana PD kebersihan
    d. Pembuatan perencanaan ulang bangunan gedung PEMDA JL A. Yani
    e. Rehabilitasi gedung Gelangang Taruna Wilayah Karees
    f. Rehablitasi Kantor cabang Dinas Wilayah Cibenying
    g. Peningkatan dan rehabilitasi bangunan sarana Pemerintah (Kantor Cabang Dinas Bangunan Kota Bandung)

18. Program penelitian dan pengembangan system dan prsedur management tata ruang kota
    a. Database bangunan (lanjutan)
    b. Penysunan standar perencanaan bangunan pasar

19. Program pengawasan dan penertiban bangunan meliputi kegiatan :
    a. Pengawasan Bangunan
    b. Pengawasan pemanfaatan bangunan
    c. Pengusutan dan pembongkaran bangunan

20. Program pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Bojonegara, meliputi kegiatan :
    a. Pendataan bangunan di wilayah Bojonegara
    b. Pengendalian dan pengawasan bangunan melalui pemanggilan dan penghentian

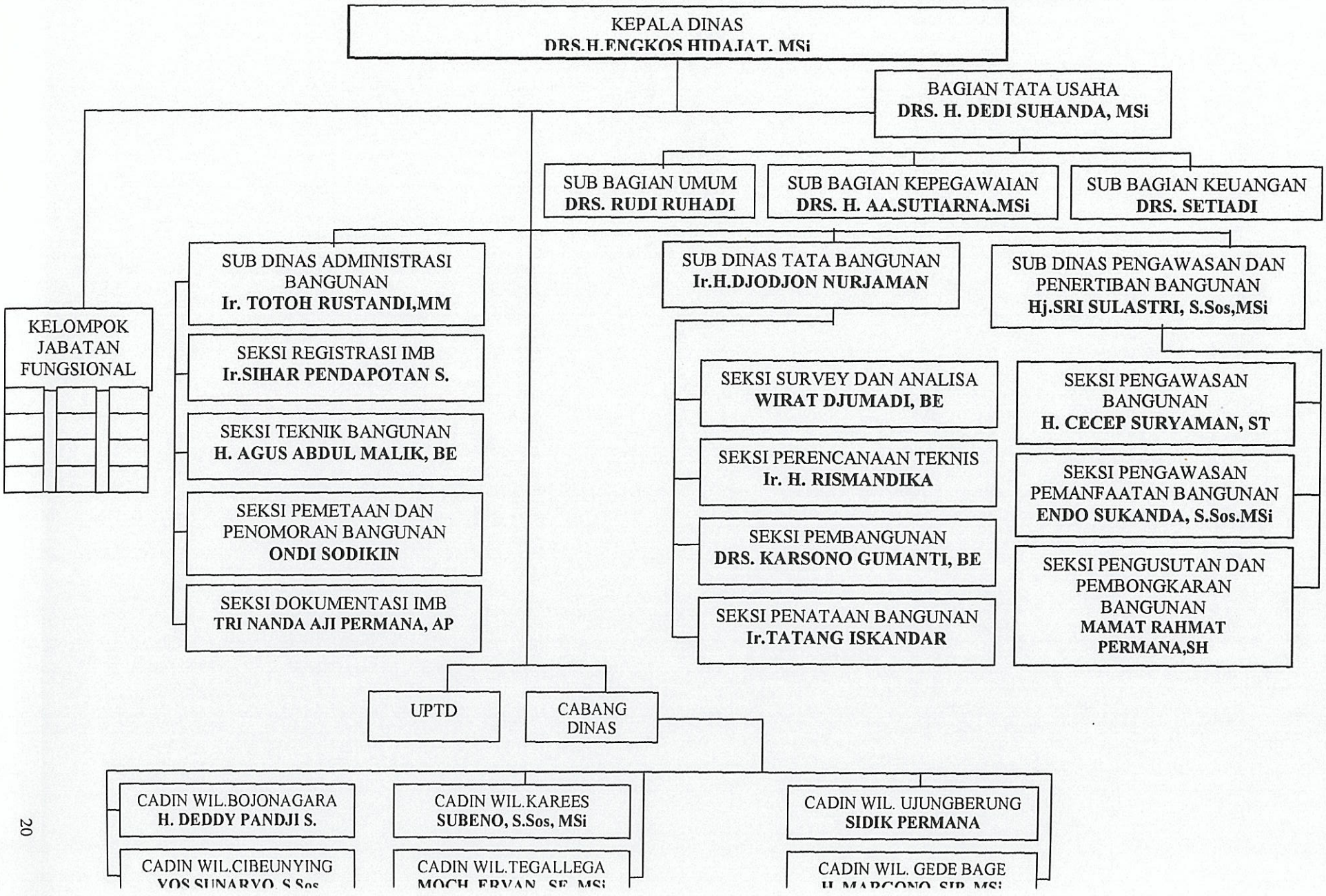
c. Melaksanakan pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib bangunan.

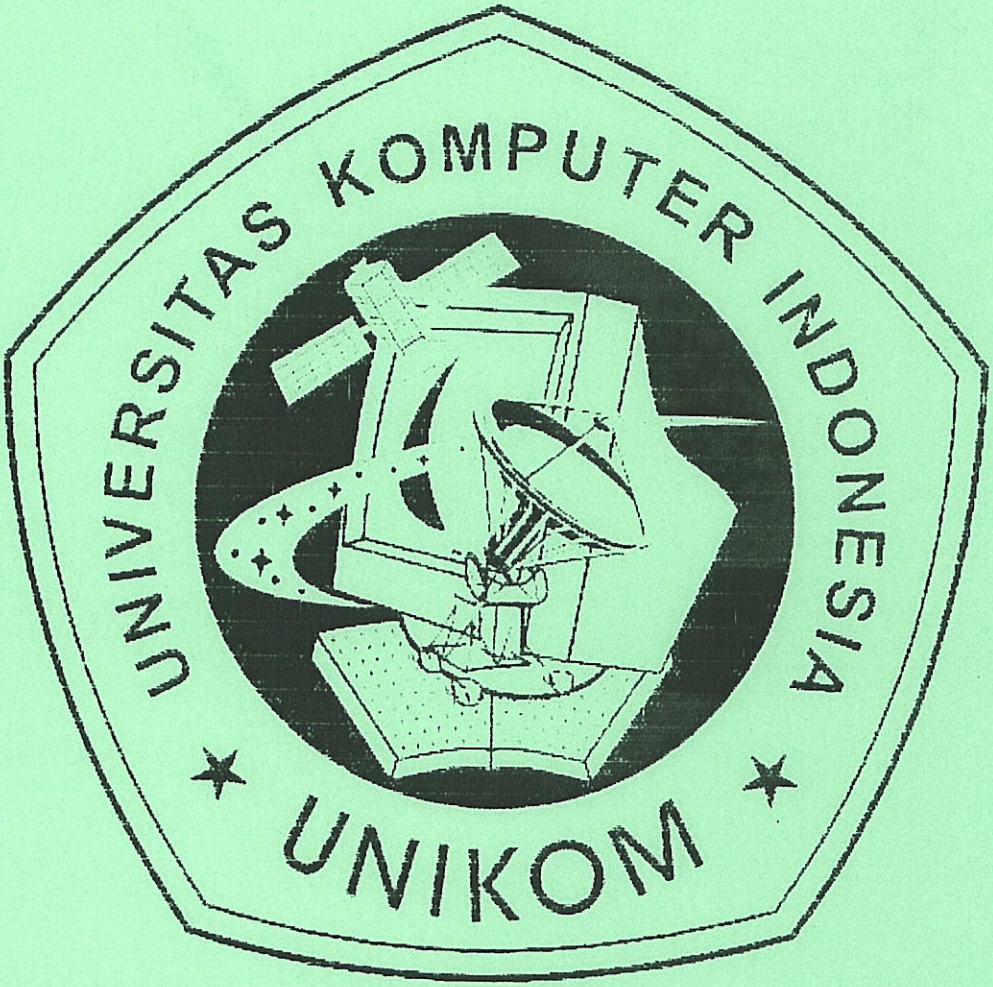
21. Program pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Cibenying, meliputi kegiatan :
    a. Penadtaan bangunan di wilayah Cibenying
    b. Pengendalian dan pengawasan bangunan melalui pemanggilan dan penghentian
    c. Melaksanakan pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib bangunan.
22. Program pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Karees, meliputi kegiatan :
    a. Pendataan bangunan di wilayah Karees
    b. Pengendalian dan pengawasan bangunan melalui pemanggilan dan penghentian
    c. Melaksanakan pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib bangunan.
23. Program pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Tegalega, meliputi kegiatan :
    a. Pendataan bangunan di wilayah Tegallega
    b. Pengendalian dan pengawasan bangunan melalui pemanggilan dan penghentian
    c. Melaksanakan pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib bangunan.
24. Program pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Ujungberung,meliputi kegiatan :
    a. Pendtaan bangunan di wilayah Ujungberung
    b. Pengendalian dan pengawasan bangunan melalui pemanggilan dan penghentian
    c. Melaksanakan pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib bangunan.
25. Program pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan wilayah Gedebage, meliputi kegiatan :
    a. Pendtaan bangunan di wilayah Gedebage

b. Pengendalian dan pengawasan bangunan melalui pemanggilan dan penghentian

c. Melaksanakan pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib bangunan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BANGUNAN KOTA BANDUNG




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM